



KR GROUP  
http://www.krjogja.com

# Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN  
SCAN BARCODE



SABTU KLIWON

12 AGUSTUS 2023 ( 24 SURTA 1957 / TAHUN LXXVIII NO 302)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN



VENUE PIALA DUNIA U-17: Foto udara Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/8/2023). Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, PSSI dan FIFA telah menyepakati venue Piala Dunia U-17 akan diadakan di Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

## Sekolah Negeri Tidak Merata, Pangkal Masalah PPDB Perlu Evaluasi Total, Bukan Hapus Zonasi

JAKARTA (KR) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menyatakan, Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek hendaknya melakukan evaluasi total bagaimana regulasi dan implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di tiap daerah selama 7 tahun, mengingat persoalan dalam implementasi PPDB Zonasi masih terus terjadi dengan masalah yang sama setiap tahunnya.

Ini bukti indikasi bahwa Kemendikbudristek dan Pemda tidak melakukan evaluasi yang mendasar terhadap PPDB, ada pun dilakukan hanya formalitas dan tidak ada perbaikan atau tindak lanjut yang signifikan selama ini.

Kornas P2G Satriawan Salim mengatakan, tujuan utama PPDB Zonasi ini baik, untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, untuk mendekatkan anak bersekolah dekat dengan rumahnya sehingga relatif tidak berbiaya dari segi transportasi, dan aman dalam jangkauan rumah. Selain itu, memprioritaskan anak dari keluarga

miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah. Jalur zonasi dan jalur afirmasi.

"Nah PPDB begini kan rasanya sangat baik tujuannya. Kami P2G setuju untuk dikaji ulang, evaluasi total, tapi bukan menghapus PPDB Zonasi dan Afirmasi tadi khususnya. Sebab jika dihapus maka sekolah akan makin berbiaya mahal, anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya mahal. Padahal sudah menjadi kewajiban negara sesuai perintah Pasal 31 UUD 1945 untuk membiayai pendidikan," jelas Satriawan Salim di Jakarta, Ju-

mat (11/8).

Dikatakan, salah satu pokok pangkal masalah PPDB selama ini adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Ini persoalan hulunya sehingga Pemerintah mestinya tuntas ini dulu, bangun sekolah dengan basis analisis data demografis. Jadi tak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa bahkan tak ada siswa atau sebaliknya sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas.

Jadi, tandas Satriawan, kalau Pemerintah langsung menghapus PPDB Zonasi ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan dan terkesan ini adalah rencana yang reaktif. P2G berharap ada kajian mendalam, duduk bersama evaluasi PPDB 7 tahun melibatkan Kemendikbudristek, seluruh Pemda, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan stakeholders lainnya.

\* Bersambung hal 7 kol 1

**Analisis**  
**Merdekakan Anak Stunting**  
Anif Muchlashin MSc MA

**MERDEKA** menurut Wikipedia berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti *maharddhika* yang dalam arti suku katanya adalah kaya, sejahtera dan kuat. Secara terjemahan bebas, merdeka dapat diartikan terbebas dari segala belenggu, kekangan, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka bukan hanya terbebas dari pihak luar namun juga terbebas dari kekangan dari dalam karena menderita stunting.

Memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu agenda penting dan PR pemerintah saat ini. Stunting merupakan masalah besar yang tidak dapat dipelekan. Bukan hanya mengentaskan masalah gizi semata lebih jauh dari itu stunting adalah isu jitu dalam memberikan kesempatan yang luas pada generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesehatannya demi masa depan bangsa yang lebih baik. Jika anak stunting tidak diberi intervensi dengan baik maka anak yang terkena stunting akan mengalami sakit-sakitan, rapuh dengan virus dan IQ tidak akan bertumbuh kembang secara sempurna.

Stunting bukan penyakit, tapi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan panjang atau

\* Bersambung hal 7 kol 1

### LELANG PENGADAAN BARANG

## Mantan Kabasarnas Akui Terima Uang

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, mantan Kepala Basarnas Henri Alfiandi mengakui telah menerima uang terkait sejumlah lelang proyek pengadaan barang di Basarnas. Pengakuan tersebut disampaikan saat penyidik KPK memeriksa Henri Alfiandi dan Koorpsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto di Mako Puspom TNI.

"Informasi dari teman-teman yang melakukan pemeriksaan, keduanya kooperatif mengakui adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak swasta terkait dengan lelang proyek di Basarnas dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/8).

Menurut Ali, pihak swasta yang dimaksud kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh KPK. Pemeriksaan terhadap Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto difasilitasi oleh Puspom TNI dan merupakan bagian dari sinergi dan koordinasi untuk penyelesaian

perkara yang ditangani bersama antara KPK dan Puspom Mabes TNI.

Hingga saat ini KPK dan Puspom TNI telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni Kepala Basarnas Marsyda Henri Alfiandi (HA) dan Koorpsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC). Kemudian Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejahtera (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGGK (Inter-teknografi Sejahtera) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Kasus dugaan korupsi suap di lingkungan Basarnas berawal pada tahun 2021, saat itu Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Kemudian pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan, yakni pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan

\* Bersambung hal 7 kol 1

### UNTUK MAJU PILEG 2024

## Hakim Kabulkan Komeng Ganti Nama



KR-Instagram @komeng.original  
**Alfiansyah Komeng**

**BOGOR (KR)** - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengabulkan permohonan komedian Komeng berganti nama untuk keperluan pencalonan di DPD RI pada Pemilihan Legislatif

(Pileg) 2024. Pemilik nama lengkap Alfiansyah Bustami itu menambahkan nama panggunanya 'Komeng' pada bagian akhir namanya menjadi Alfiansyah Bustami Komeng.

Humas PN Kelas IA Cibinong Amran S Herman di Bogor, Jumat (11/8), mengungkapkan bahwa permohonan pergantian nama itu dikabulkan oleh hakim pada Mei 2023. "Dikabulkan oleh hakim, menambahkan nama Komeng di belakangnya," ungkapnya.

Menurut Amran, alasan Komeng melakukan pergantian nama karena ingin sukses dalam Pileg 2024. Pergantian nama ini menjadi salah satu cara untuk memudahkan

\* Bersambung hal 7 kol 5

## Kemiskinan di DIY, Kok Tinggi

PERSOALAN kemiskinan penduduk di DIY masih menjadi PR dari tahun ke tahun. Laporan BPS, September 2022, pada persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,49 persen atau secara absolut, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang. Angka ini naik dibandingkan kondisi Maret 2022, dimana persentase penduduk miskin pada saat itu adalah 11,34 persen dan jumlah

penduduk miskin sebanyak 454,76 ribu orang.

Angka tinggi ini nyata-nyata berbanding terbalik dengan indeks kebahagiaan yang juga dikeluarkan oleh BPS. DIY masuk dalam 10 besar provinsi paling bahagia di

Indonesia dengan angka harapan hidup yang cukup tinggi. Meski dianggap miskin di DIY

\* Bersambung hal 7 kol 1



### PK KUBU MOELDOKO DITOLAK MA

## AHY: Demokrat Harus Tetap Mawas Diri



KR-Antara/Sigid Kurniawan  
**Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) memotong kue ulang tahunnya sesuai menyampaikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.**

JAKARTA (KR) - Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kubu Moeldoko yang meminta majelis hakim meninjau kembali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022 pada 29 September 2022. Terkait hal ini Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, dirinya dan kader Demokrat tetap mawas diri meski MA menolak per-

mohonan peninjauan kembali (PK) tersebut.

"Upaya untuk melemahkan Partai Demokrat tetap terbuka. Namun, partai dan para kader selalu siap menghadapi ancaman tersebut. Dan kemarin 10 Agustus itu adalah skenario Tuhan. Jadi saya senang, kami semua, para kader juga," kata AHY saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (11/8).

\* Bersambung hal 7 kol 1

### PELECEHAN KONTESTAN KECANTIKAN

## Polisi Tunggu Kesiapan Korban

JAKARTA (KR) - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan masih menunggu kesiapan para korban pelecehan pada penyelenggaraan kontes kecantikan untuk diminta keterangan. Polisi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam hal memberikan pendampingan psikologis kepada korban.

"Kita lihat kesiapan dari korban-korban, karena menurut keterangan dari kuasa hukum masih dalam kondisi trauma," ucap Hengki ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (11/8).

Hengki menjelaskan, setelah kondisi korban stabil, penyidik akan melanjutkan proses pengusutan kasus dugaan pelecehan tersebut dengan meminta keterangan korban. "Kita

akan periksa korban dulu, kemudian pelapor kita akan periksa. Apabila ini memenuhi delik atau pun perbuatan pidana akan kita tindak lanjut sampai menemukan siapa terdangkanya," ucapnya.

\* Bersambung hal 7 kol 5



● SENIN 31 Juli 2023, saya mampir rumah teman di Suryomentaraman Yogyakarta. Di depan rumah terparkir truk proyek renovasi Beteng Kraton. Di kaca samping truk ada tulisan: Tidurku Terbatas Karena Tugas. Ternyata Pak Sopir tidur lelap di kursi kemudi. (Merhatin, Joyonegaran MG 2/946 RT 42 RW 13 Mergangsan, Yogyakarta 55151)-d

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:47	15:08	17:42	18:53	04:31

Sabtu, 12 Agustus 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

**PROMO SPESIAL KEMERDEKAAN**  
**Yuk Intip Si Kecil**  
dengan Pemeriksaan USG 4D  
Rp 235.000  
Informasi & Pendaftaran: 0811 8550 060